IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PERENCANAAN ANGGARAN DI KABUPATEN BEKASI

Haseena Waheda Ernandi
NPP. 33.1118
Program Studi Keuangan Publik
Email: haseenawaheda@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Komaedi, M.Si.
Email : komedi@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement: *The utilization of the Regional Government Information System (SIPD) in the budget planning process in Bekasi Regency has not reached an optimal level, encountering systemic anomalies such as server instability, human resource competency gaps, and inter-organizational coordination issues.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) in budget planning in Bekasi Regency..* ***Method:*** *This study uses a descriptive qualitative method with a case study approach at the Regional Development Planning Agency (Bappeda) of Bekasi Regency. Data collection procedures were executed through in-depth interviews, participatory observations, and document reviews.* ***Result:*** *The study found that functional misalignments occur across multiple dimensions. The human dimension demonstrates an imbalance in digital literacy among the management apparatus at the work unit level. The organizational dimension reveals an asymmetry in cross-sector coordination in controlling the discipline of data-entry deadlines. The technology dimension records a significant frequency of central server failures during peak periods of budget formulation. These weaknesses degrade the net benefits of the system, evidenced by the delay in the ratification of the Budget Execution Document (DPA) and inconsistencies in the regional expenditure nomenclature.* ***Conclusion:*** *This study concludes that the implementation of SIPD in Bekasi Regency has not fully achieved optimal functional alignment. It is recommended that mitigation strategies continue to be implemented through daily technical assistance, the formulation of complementary standard operating procedures, and the capacity building of local hardware to reduce computational error ratios.*

Keywords: *Budget Planning; HOT-Fit Model; Information System Evaluation; Regional Government Information System (SIPD); Technology Quality.*

ABSTRAK

Permasalahan: Penulis berfokus pada pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam proses perencanaan anggaran di Kabupaten Bekasi yang diidentifikasi belum mencapai tingkat optimal. Peralihan sistem menuju digitalisasi ini memunculkan dinamika administratif, gangguan teknis server, dan kesenjangan kompetensi aparatur yang berdampak pada penundaan pengesahan dokumen anggaran. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam perencanaan anggaran di Kabupaten Bekasi. **Metode:** Penelitian ini memanfaatkan metode kualitatif deskriptif berbekal pendekatan studi kasus pada entitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi. Teknik pengumpulan data dieksekusi melalui teknik wawancara mendalam, pengamatan partisipatoris, serta telaah dokumen, dianalisis dengan model Miles dan Huberman. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian membuktikan terjadinya ketidaksesuaian fungsional pada multi-dimensi. Dimensi manusia memperlihatkan ketimpangan literasi digital antar aparatur pengelola tingkat satuan kerja. Dimensi organisasi mengungkap asimetri koordinasi lintas sektor dalam mengendalikan kedisiplinan tenggat waktu penginputan data. Dimensi teknologi mencatat frekuensi kegagalan peladen pusat yang signifikan pada periode puncak perumusan anggaran. Celah kelemahan tersebut mendegradasi manfaat bersih sistem, terbukti dari penundaan waktu pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta presensi ketidaksinkronan nomenklatur belanja daerah. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi SIPD di Kabupaten Bekasi belum mencapai tingkat kesesuaian fungsional yang optimal. Adapun saran penelitian ini yakni perlunya penguatan intensifikasi pendampingan teknis harian, penyusunan Prosedur Operasi Standar (SOP) komplementer, dan peningkatan kapasitas perangkat keras lokal guna mereduksi galat komputasi.

Kata kunci: Evaluasi Sistem Informasi; Kualitas Teknologi; Model HOT-Fit; Perencanaan Anggaran; Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik dituntut mampu menyesuaikan diri dengan disrupsi digital, khususnya dalam manajemen keuangan daerah. Penerapan inisiatif berbasis elektronik atau e-government merupakan intervensi struktural yang logis untuk menekan asimetri informasi dan mendorong transparansi, sekaligus meminimalisasi ruang penyimpangan atau korupsi (Ismail et al., 2020). Transformasi tata kelola yang tertuang melalui platform Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara formal diamanatkan oleh UU No. 23 Tahun 2014 dan Permendagri No. 70 Tahun 2019. Tuntutan tata kelola yang responsif ini mendorong aparatur berupaya menerapkan inovasi pelayanan dalam roda organisasi publik secara efisien dan akuntabel (Prabowo et al., 2022).

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Kebijakan digitalisasi nasional memaksa migrasi radikal menuju platform terintegrasi SIPD, yang pada kenyataannya memantik serangkaian isu strategis di daerah otonom (Danar, 2024) . Kabupaten Bekasi, dengan skala penganggaran masif, mengalami persoalan yang

bermanifestasi pada lambatnya pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Kegagalan sistemik akibat instabilitas server kementerian serta ketidaksiapan rekayasa proses bisnis birokrasi lokal menjadi sorotan. Disparitas ini sesuai dengan temuan bahwa penerapan teknologi di institusi publik yang tidak dibarengi dengan keandalan pedoman tata kelola keuangan sering kali justru menurunkan akuntabilitas dan efisiensi (Moenek & Suwanda, 2019).

1.3 Urgensi Penelitian

Dinamika pemerintahan daerah sebagai organisme yang sarat kepentingan sangat bergantung pada eksekusi anggaran yang tepat waktu (Wasistiono & Rohmadin, 2023) . Keterlambatan penetapan kalender fiskal berisiko mendisrupsi kinerja keuangan daerah secara agregat, yang secara linier terbukti dapat memperlambat gerak pertumbuhan ekonomi di suatu kawasan (Komaedi et al., 2024) . Jika distorsi dalam SIPD ini dibiarkan tanpa evaluasi yang holistik, pencairan anggaran fisik dan penyelenggaraan layanan dasar publik akan terus tersandera. Mengacu pada perdebatan global terkait transformasi digital, ketergantungan pada standar operasional pusat tanpa adaptasi lokal sering kali menurunkan utilitas pelayanan publik (Machljankin et al., 2022).

1.4 Penelitian Terdahulu

Kajian ini dilandaskan pada penelitian terdahulu mengenai implementasi SIPD, di antaranya penelitian Annisa (2021) di Kota Bukittinggi yang menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dengan temuan bahwa SIPD mempermudah pengawasan namun rentan gangguan perangkat dan jaringan. Penelitian Nasution & Nurwani (2021) di BPKAD Kota Medan juga menunjukkan pemanfaatan SIPD belum optimal dan butuh penguatan kapasitas bimbingan teknis. Penelitian Wurara, Kimbal, & Kumayas (2020) di Kota Manado serta Lestari (2022) di Kabupaten Sleman menggunakan teori Edward III yang menyoroti kendala pada disposisi pelaksana dan koordinasi antarperangkat daerah. Selanjutnya, penelitian Amanda & Hidayat (2023) di Kota Bandung dengan pendekatan Charles O. Jones menemukan hambatan keterbatasan pelatihan dan kendala operasional sistem.

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan penelitian ini terletak pada peralihan fokus instrumen evaluasi yang lebih komprehensif, yakni tidak hanya menilik produk kebijakannya, melainkan membedah secara simetris interaksi sosio-teknisnya menggunakan pendekatan kesesuaian Human, Organization, and Technology-Fit (HOT-Fit) dari Yusof et al. (2008). Penekanan riset menelusuri tidak sekadar keberhasilan instalasi teknis, melainkan tingkat kematangan ekosistem dan dampak akhir berupa manfaat bersih bagi tata kelola penganggaran daerah.

1.6 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam perencanaan anggaran di Kabupaten Bekasi.

II. METODE

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif deskriptif berbekal metode studi kasus. Pemilihan metode ini dilandaskan pada kemampuannya untuk memfasilitasi peneliti dalam membedah serta mengamati fenomena relasi perilaku aparatur dengan dinamika teknologi secara natural, mendalam, dan komprehensif, mengingat anomali implementasi birokrasi ini tidak dapat ditangkap utuh semata-mata menggunakan instrumen statistik (Nurdin & Hartati, 2019) . Penelitian dilaksanakan di lokasi instansi sentral pengelola keuangan, yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bekasi. Pengambilan data di lapangan dilakukan selama kurun waktu 3 (tiga) bulan, terhitung sejak bulan Januari hingga Maret 2024.

Penentuan subjek penelitian diterapkan dengan teknik purposive sampling, yang secara spesifik menjaring aparatur yang memiliki tingkat persinggungan langsung dengan sistem pelaporan keuangan. Informan kunci dalam riset ini adalah Kepala Bidang Perencanaan Bappeda serta Kepala Bidang Anggaran BPKAD. Keduanya dipilih sebagai informan kunci dengan alasan bahwa secara fungsional kelembagaan, kedua posisi ini merupakan otoritas utama yang merumuskan, memvalidasi pergerakan pagu dokumen APBD, sekaligus aktor penanggung jawab berjalannya siklus sistem SIPD secara utuh. Adapun informan pendukung melibatkan jajaran pelaksana pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Prosedur pengumpulan data dijalankan lewat wawancara mendalam, pengamatan partisipatoris, dan dokumentasi historis APBD. Untuk memastikan keabsahan temuan empiris di lapangan, peneliti melakukan pengujian data menggunakan teknik triangulasi sumber dengan cara membandingkan ragam informasi hasil wawancara cross-sector terhadap bukti otentik log sistem. Analisis data kemudian diolah memakai kerangka analitik Miles dan Huberman, yang meliputi tahap reduksi data yang tidak relevan, penyajian susunan narasi terstruktur, hingga bermuara pada penarikan kesimpulan akhir.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Dimensi Manusia

Evaluasi pada dimensi kapasitas subjek menunjukkan ketidakselarasan fungsional yang lebar. Pada titik episentrum perencana Bappeda, literasi sistem berada dalam tingkat memadai berkat rutinitas pendidikan bimbingan teknis. Namun, kapasitas ini berbanding terbalik dengan kompetensi aparatur di hilir perangkat kerja. Resistensi sistemik mendorong munculnya pengerjaan data manual di perangkat luring yang kemudian disalin secara terburu-buru ke sistem basis data pusat di detik-detik akhir tenggat batas masuk data. Pola ini mendukung pandangan Sabani (2020) di mana defisit literasi pada tahap akar rumput merupakan batu sandungan utama dalam perwujudan transparansi e-government di tingkat daerah.

3.2 Dimensi Organisasi

Dinamika dimensi organisasi memperlihatkan tumpulnya asimetri koordinasi dalam kedisiplinan integrasi data antar instansi. Bukti faktual mencatat, pada penyusunan kerangka Program Penanaman Modal, 50% usulan gagal tervalidasi akibat terlewatnya lampiran Standar Biaya Khusus (SBK). Persoalan utamanya berpusat pada tidak tersedianya referensi Prosedur Operasi Standar (SOP) lokal yang fleksibel, memicu perdebatan alot nomenklatur antara kementerian pusat dan pengguna di daerah. Seperti yang dikaji oleh (Gangneux dan Joss (2022), minimnya otonomi dan penyesuaian aturan data lokal dapat menyebabkan inisiatif sentralisasi mengalami guncangan birokrasi administratif yang hebat.

3.3 Dimensi Teknologi

Pada ranah perangkat keras, keandalan server pusat terbukti krusial. Catatan sistem memvalidasi frekuensi kejadian "peladen terputus" massal setiap momen krusial penyusunan DPA. Kegagalan kapasitas tampung antrean lalu lintas data dari seluruh Indonesia secara beruntun memicu penghapusan riwayat baris rincian pagu yang sedang ditik aparatur. Hal ini merefleksikan kegagalan mitigasi kontrol kualitas teknologi (Even & Shankaranarayanan, 2021), yang mendegradasi mutlak elemen kepercayaan pengguna kepada validitas perangkat lunak pemerintah pusat.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kendala yang beririsan pada ketiga dimensi di atas bermuara pada penurunan drastis parameter Manfaat Bersih. Temuan penelitian membuktikan bahwa terjadi distorsi fatal lokasi pagu Perjalanan Dinas Luar Negeri yang memiliki deviasi 25% (0 rupiah) pada saat transisi dokumen. Lebih parah, deviasi penjabaran naskah KUA-PPAS ke DPA untuk Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah mengalami penyusutan angka yang tajam dari Rp1,41 miliar menjadi hanya Rp825 juta (deviasi sebesar 58,33%). Sama halnya dengan riset terdahulu oleh Annisa (2021) dan Lestari (2022) bahwa meskipun sistem mendorong pengawasan transparan, ketidaksinkronan koordinasi dan malfungsi jaringan akan selalu menghambat ketepatan waktu. Kelambatan pengesahan DPA berakibat pada pembekuan perputaran modal proyek pembangunan infrastruktur.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Terdapat temuan menarik mengenai strategi mitigasi dan upaya resolusi yang langsung dilakukan oleh pemerintah daerah dalam merespons hambatan implementasi tersebut. Pemerintah Kabupaten Bekasi telah melakukan intensifikasi sosialisasi, menyelenggarakan pendampingan teknis *ad-hoc* di luar jam reguler, serta melakukan investasi pengadaan perangkat keras lokal berkomputasi tinggi yang memadai di seluruh perangkat daerah untuk mereduksi kelelahan dan *error* pengguna saat mengoperasikan SIPD pada masa puncak jadwal penganggaran.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam proses perencanaan anggaran di Kabupaten Bekasi belum sepenuhnya mencapai kesesuaian fungsional yang optimal pada parameter manusia, organisasi, dan teknologi. Interaksi yang melemah pada ketiga instrumen ini mengakibatkan deviasi anggaran, keterlambatan pengesahan DPA, dan rendahnya efisiensi proses pelaporan. Disarankan agar Pemerintah Daerah terus memperkuat penyusunan SOP komplementer yang terstandardisasi lokal, serta meningkatkan pendampingan kapasitas literasi digital secara berkelanjutan kepada unit kerja hilir guna meminimalisir kesalahan manual.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini dibatasi pada fokus kajian perencanaan dan penganggaran daerah dalam lingkup instansi strategis TAPD dan Bappeda Kabupaten Bekasi, sehingga temuan empiris lebih menyorot dimensi kelemahan makro administratif dan teknologis.

Arah Masa Depan Penelitian. Penulis menyarankan penelitian lanjutan dapat mengembangkan instrumen analisis pada dimensi pengukuran evaluasi efektivitas pasca-pelaksanaan kebijakan

atau survei kepuasan *user interface* secara kuantitatif yang mengkaji perbandingan keberhasilan antar beberapa daerah yang menggunakan *platform* SIPD Republik Indonesia.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Rektor IPDN, Dosen Pembimbing Skripsi, serta segenap jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi termasuk Bappeda dan BPKAD yang telah memberikan wawasan berharga, menyediakan akses data lapangan, serta meluangkan waktu selama proses pengumpulan data penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Agostino, D., Saliterer, I., & Steccolini, I. (2022). Data science and financial information in the public sector challenges for accounting and accountability. *Public Money & Management*, 42(5), 304-307. https://doi.org/10.1080/09540962.2022.2063071

Annisa. (2021). *Penerapan Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi*. Universitas Andalas.

Danar, O. R. (2024). Digital transformation of Indonesian administration and bureaucratic system. *International Journal of Electronic Governance*, 16(2), 152-171. https://doi.org/10.1504/IJEG.2024.140789

Even, A., & Shankaranarayanan, G. (2021). Data quality issues in AI-intensive public services. *Information Systems Frontiers*, 23, 1113–1130. https://doi.org/10.1007/s10796-020-10067-5

Gangneux, J., & Joss, S. (2022). Crisis management including data sharing and the introduction of new technologies. *Local Government Studies*, 48(4), 1-22. https://doi.org/10.1080/03003930.2022.2059345

Halim, A. (2018). *Manajemen Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN.

Ismail, I., Fathonih, A., Prabowo, H., Hartati, S., & Redjeki, F. (2020). Transparency and Corruption: Does E-Government Effective to Combat Corruption?. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(4), 5396-5404. https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I4/PR201639

Komaedi, K., Prabowo, H., Akbar, B., Daraba, D., Ilham, M., Mansyur, M., Averus, A., & Madjid, U. (2024). The Influence Of Regional Financial Performance On Economic Growth In Central Java Province. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 4(7), 5922–5944. https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i7.1326

Lestari, D. (2022). Analisis Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Bappeda Kabupaten Sleman. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan*, 3(1), 12-25. https://journal.umy.ac.id/index.php/jpk

Machljankin, J., Neumann, O., Steiner, R., & Ege, J. (2022). Exploring the role of consulting in local government digital transformation. *Public Money & Management*, 42(3), 202-211. https://doi.org/10.1080/09540962.2022.2026725

Moenek, R., & Suwanda, D. (2019). *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*. PT Remaja Rosdakarya.

Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendekia. [15]
Prabowo, H., Suwanda, D., & Syafri, W. (2022). *Inovasi Layanan Pada Organisasi Publik*. PT Remaja Rosdakarya.
Sabani, A. (2020). Investigating the influence of transparency on the adoption of e-Government in Indonesia. *Journal of Science and Technology Policy Management*, 12(2), 236–255. https://doi.org/10.1108/JSTPM-03-2020-0046
Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
Suwanda, D., Pebriansyah, P., Novidarta, N., & Santoso, Y. P. (2020). *Panduan Teknik Aplikasi Sistem Informasi Barang E-Keuda*. PT Remaja Rosdakarya.
Tumija, T., Hendra, A., & Sinurat, M. (2023). Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Media Birokrasi*, 5(1), 79–91. https://doi.org/10.33701/jmb.v5i1.3389
Wasistiono, S., & Rohmadin, S. (2023). *Teori Organisasi Pemerintah Daerah*. PT Rajagrafindo Persada.
Yusof, M. M., Kuljis, J., Papazafeiropoulou, A., & Stergioulas, L. K. (2008). An evaluation framework for Health Information Systems: human, organization and technology-fit factors (HOT-fit). *International Journal of Medical Informatics*, 77(6), 386-398. https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2007.08.011